

PELANGGARAN ETIK WAKIL KETUA KPK

Lagi, Dewas Sidangkan Lili Pintauli

JAKARTA (KR) - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) berencana menggelar sidang tentang dugaan pelanggaran etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar, Selasa (5/7). Terkait hal itu mencuat isu mengenai pengunduran diri Lili Pintauli Siregar dari jabatan sebagai Wakil Ketua KPK.

Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri menyatakan, sampai kemarin Lili Pintauli Siregar belum mengonfirmasi mengenai isu pengunduran dirinya dari lembaga antirasuah tersebut. "Informasi yang kami peroleh, pimpinan KPK Ibu Lili Pintauli Siregar belum mengonfirmasi perihal tersebut," kata Ali di Jakarta, Jumat (1/7).

Ia menegaskan, Lili masih berkonsentrasi menjalankan tugasnya serta agenda-agenda penugasan lainnya untuk beberapa waktu ke depan. Selain itu, ujar Ali, KPK tetap mendukung proses penegakan etik yang sedang berlangsung di Dewan Pengawas KPK sebagaimana tugas dan kewenangan yang diatur pada Pasal

37B Undang-Undang (UU) KPK.

"Untuk itu, kami yakin, penegakan Kode Etik insan komisi adalah bagian dari upaya penguatan pemberantasan korupsi yang dilaksanakan KPK," tegas Ali.

Dewas KPK akan menggelar sidang dugaan pelanggaran etik terhadap Lili. Pasalnya, yang bersangkutan kembali dilaporkan ke Dewas KPK atas dugaan menerima fasilitas akomodasi hotel hingga tiket menonton ajang balap MotoGP 2022 di Sirkuit Internasional Mandalika Nusa Tenggara Barat (NTB) dari salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Untuk sidang etik bagi LPS (Lili Pintauli Siregar) dijadwalkan 5 Juli

2022," kata Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris di Jakarta.

Sebelumnya, Dewas KPK memutuskan untuk melanjutkan kasus dugaan pelanggaran etik Lili ke sidang etik. Selain itu, Dewas KPK telah mengumpulkan bahan keterangan dengan meminta keterangan dari sejumlah saksi atas dugaan pelanggaran etik Lili tersebut.

Sebagaimana peraturan Dewas KPK, sidang dugaan pelanggaran etik digelar secara tertutup. Sedangkan pembacaan putusan disampaikan secara terbuka.

Sebelumnya Lili pernah dijatuhi sanksi berat berupa pemotongan gaji pokok sebesar 40 persen selama 12 bulan. Hal ini karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku berupa menyalahgunakan pengaruh selaku pimpinan KPK untuk kepentingan pribadi dan berhubungan langsung dengan pihak yang perkaranya sedang ditangani KPK, yakni Wali Kota Tanjungbalai M Syahril.

(Ful)-d

35 Parpol Ajukan Pembukaan Akses Sipol

JAKARTA (KR) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sampai 1 Juli 2022 telah menerima pengajuan permohonan pembukaan akses Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) dari 35 partai politik.

"Partai politik yang sudah diterima permohonan pembukaan akses Sipol per 1 Juli 2022 pukul 17.00 WIB yakni 31 partai nasional dan 4 partai lokal Aceh," kata Anggota KPU RI Idham Holik di Jakarta, Jumat (1/7).

Ia menyebutkan, permohonan pembukaan akses Sipol tersebut, yakni dari Partai Golongan Karya, Partai Bhinneka Indonesia, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Bulan Bintang, Partai Swara Rakyat Indonesia, Partai Rakyat Adil Makmur, Partai Persatuan Indonesia, Partai Demokrat, Partai NasDem, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Selanjutnya, Partai Solidaritas

Indonesia, Partai Keadilan dan Persatuan, Partai Ummat, Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Pandu Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Republikku Indonesia, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Pergerakan Kebangkitan Desa, dan Partai Garda Perubahan Indonesia.

Parpol lainnya, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Amanat Nasional, Partai Negeri Daulat Indonesia, Partai Buruh, Partai Berkarya, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Reformasi, Partai Kedaulatan, Partai Republik, dan Partai Mahasiswa Indonesia.

Sementara empat partai lokal Aceh, yakni Partai Adil Sejahtera, Partai Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

KPU RI, kata Idham, telah melun-

curkan Sipol untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024 pada Jumat (24/6) lalu. Lembaga penyelenggara Pemilu ini menetapkan Sipol sebagai alat bantu pendaftaran dan verifikasi partai politik.

Sipol tersebut, kata Idham, merupakan kewenangan atributif KPU RI yang diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa KPU diberikan kewenangan untuk mengatur pelaksanaan pendaftaran dan verifikasi partai politik.

Data-data yang harus diunggah ke dalam aplikasi Sipol, lanjut Idham, adalah profil parpol, keanggotaan, serta kepengurusan dan kantor parpol. Dalam rangka memperlancar pendaftaran parpol, KPU dengan semangat melayani juga membuat help desk atau meja bantuan layanan agar parpol bisa mengakses.

(Ant/San)-d

SOAL IDUL ADHA YANG BERBEDA

Letak Arab Lebih Barat dari Indonesia

JAKARTA (KR) - Kementerian Agama (Kemenag) menetapkan 1 Zulhijah 1443 H jatuh pada Jumat, 1 Juli 2022. Dengan demikian, Hari Raya Idul Adha 1443 H jatuh hari Ahad, 10 Juli 2022. Ketetapan ini berbeda dengan Arab Saudi yang menetapkan 10 Zulhijah 1443 H jatuh pada Sabtu, 9 Juli 2022

Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah (Urais dan Binsyar) Kemenag, Adib menjelaskan, perbedaan wak-

tu itu disebabkan karena letak Arab Saudi lebih barat dari Indonesia.

"Waktu di Indonesia lebih cepat 4 jam, tetapi hilal justru mungkin terlihat lebih dahulu di Arab Saudi, karena terlihatnya di sebelah barat pada saat matahari terbenam atau dikenal dengan istilah *ghurub asy-syams*," terang Adib, di Jakarta, Jumat (1/7).

Adib menjelaskan, semakin ke arah barat dan bertambahnya waktu, posisi hilal akan semakin

tinggi dan semakin mudah dilihat. Sementara, katanya, letak geografis Arab Saudi berada di sebelah barat Indonesia, sehingga pada tanggal yang sama posisi hilal di sana lebih tinggi.

"Jadi kurang tepat jika memahami karena Indonesia lebih cepat 4 jam dari Arab Saudi, maka Indonesia mestinya melaksanakan Hari Raya Idul Adha 1443 H juga lebih awal. Jelas pemahaman ini kurang tepat," paparnya.

Adib mengatakan, berdasarkan data hisab, pada akhir Zulkaidah 1443 H, ketinggian hilal di Indonesia antara 0 derajat 53 menit sampai 3 derajat 13 menit dengan elongasi antara 4,27 derajat sampai 4,97 derajat.

Sementara pada tanggal yang sama, posisi hilal di Arab Saudi lebih tinggi dengan posisi yang ada di Indonesia. Jadi kemungkinan hilal terlihat di Arab Saudi sangat besar," papar mantan Kepala Kanwil Kemenag Jabar ini. (Ati)-f

KUNJUNGI DESA BUGISAN PRAMBANAN

Sandiaga Terpesona Musik Pring Sedapur

KLATEN (KR) - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) Sandiaga Uno terpesona dengan musik tradisional Pring Sedapur, yakni kesenian khas Desa Bugisan Kecamatan Prambanan Klaten yang diciptakan Sutikno yang kini sudah berusia 85 tahun. Sandiaga berharap seni tradisional itu bisa diwariskan, bahkan ia akan membantu menguruskan hak kekayaan intelektual penciptaan seni pring sedapur tersebut.

"Pak Tikno sudah 85 tahun, beliau harus menurunkan kepada generasi selanjutnya. Salah satu yang bisa kita lakukan adalah memastikan hak

kekayaan intelektual kepada Pak Tikno ini," kata Sandiaga Uno saat meninjau Desa Wisata Bugisan sebagai salah satu dari 50 desa nominasi Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2022.

Dengan begitu, tercatat pula sebagai hak yang dimiliki beliau, untuk diturunkan kepada generasi selanjutnya. Pihaknya, tak ingin budaya yang sangat luhur ini berhenti hanya di Pak Tikno.

Desa Bugisan berhasil menembus 50 besar desa wisata terbaik di Indonesia, dari 3.500 peserta. Kesenian tradisional pring sedapur adalah salah satu nilai plus yang meng-

antarkan Desa Bugisan masuk 50 besar.

Sandiaga juga meminta Bupati Klaten Sri Mulyani untuk memberikan pembinaan dan lebih menggalakan kesenian pring sedapur ke desa-desa wisata yang lain.

Dalam kunjungan di Desa Bugisan, Sandiaga disuguhi berbagai potensi desa wisata di Klaten ini. Antara lain tampilan *bregada*, rebutan gunung hasil bumi, kesenian gejog lesung, sinau nguri-uri aksara Jawa, bahkan Sandiaga jug mencoba untuk ikut jemparingan dan memainkan alat musik pring sedapur. Sandiaga memilih memainkan kendang dengan dibimbing langsung oleh Pak Sutikno.

Didampingi Bupati Klaten Sri Mulyani, Sandiga meninjau berbagai produk ekonomi kreatif. Antara lain batik eco print, busana daur ulang sampah. Menteri juga menikmati minum jamu bersama bupati dan wakil bupati.

Bupati Klaten Sri Mulyani bersyukur, Bugisan masuk 50 desa wisata terbaik Indonesia. Desa Bugisan memiliki Candi Kembang yang hanya satu-satunya di Indonesia. Sebelum pandemi Pemkab Klaten setiap tahun memberikan uang pembinaan Rp 200 juta untuk mengembangkan desa-desa wisata. Saat pandemi, bantuan dihentikan sementara difokuskan untuk penanganan pandemi. (Sit)-d



Sandiaga Uno memainkan alat musik Pring Sedapur bersama Pak Tikno.

KR-Sri Warsti



KR-Surya Adi Lesmana

JAZZ MERAYAKAN RINDU: Kukuh Kudamai feat Ndarboy Genk memeriahkan Prambanan Jazz Festival 2022 bertajuk 'Sewindu Merayakan Rindu' di Kompleks Candi Prambanan, Sleman, Jumat (1/7). Deretan musisi Tanah Air seperti Andien, Pamungkas, Ardhito Pramono, Maliq & D'Essentials, Diskoria feat Fariz RM, Tulus, Sinten Remen feat Jogja Hiphop Foundation, Padi Reborn, Sore, Fiersa Besari feat Bemadry, Mus Mujiono, Deddy Dhukun, Trio Lestari dan Kahitna turut hadir menjadi obat rindu para penonton. Perhelatan berlangsung tiga hari hingga Minggu (3/7).

PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Menkeu Himpun Pajak Rp 61,01 Triliun

JAKARTA (KR) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani melaporkan Pajak Penghasilan (PPH) yang terkumpul dari Program Pengungkapan Sukarela (PPS) selama Januari hingga penutupan pada 30 Juni 2022 sebesar Rp 61,01 triliun.

Jumlah PPH yang terkumpul tersebut terdiri Rp 32,91 triliun dari peserta yang mengikuti PPS Kebijakan I dan Rp 28,1 triliun dari peserta PPS Kebijakan II.

"Ini merupakan pembayaran kewajiban dari harta yang diideklarasikan sebanyak Rp 594,82 triliun," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Program Pengungkapan Sukarela di Jakarta, Jumat (1/7).

Hingga penutupan, tercatat 247.918 wajib pajak yang berpartisipasi dalam PPS, baik wajib pajak orang pribadi maupun badan. Selain itu, terdapat 308.059 surat keterangan yang telah diterbitkan atas harta yang dilaporkan dalam PPS, yang terdiri 82.456 Surat Keterangan Kebijakan I dan 225.603 Surat Keterangan Kebijakan II.

Secara terperinci, harta yang diideklarasikan berasal dari deklarasi dalam negeri dan repatriasi senilai Rp 512,57

triliun, deklarasi luar negeri Rp 59,91 triliun, serta diideklarasikan dalam bentuk investasi melalui Surat Berharga Negara (SBN), hilirisasi, dan energi terbarukan senilai Rp 22,34 triliun.

Menkeu menuturkan deklarasi dalam negeri tercatat Rp 498,88 triliun dan repatriasi mencapai Rp 13,7 triliun. "Repatriasi ini merupakan harta luar negeri yang direpatriasikan," jelasnya.

Sementara, sambung Menkeu, deklarasi harta bersih melalui investasi meliputi Rp 19,98 triliun investasi dalam negeri dan Rp 2,3 triliun repatriasi.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu telah mengirimkan surat kepada 1,62 juta wajib pajak (WP) dalam rangka mengimbau mereka untuk mengikuti PPS. "Tim mengeluarkan surat imbauan mengingatkan kepada WP melalui email blast kepada lebih dari 1,5 juta WP," kata Staf Ahli Bidang Kepatuhan DJP Kemenkeu Yon Arsal.

Dikatakan, PPS atau Program Tax Amnesty Jilid II ini tidak akan ada lagi sehingga hal ini merupakan kesempatan terakhir bagi para WP. (Ant/San)-f

LPS PAILITKAN BPR

Tindak Tegas Pengurus Bank Nakal

JAKARTA (KR) - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai kewenangan dan mandat yang dimilikinya, dengan dibantu Tim Jaksa Pengacara Negara (JPN) pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia, telah melaksanakan tindakan hukum dengan memailitkan mantan pengurus BPR Citraloka Dana Mandiri (BPR CDM) Bandung, Jawa Barat, karena tidak kooperatif.

"LPS tidak segan untuk melakukan tindakan hukum yang tegas terhadap pengurus bank dan pemegang saham yang nakal. Kami minta agar pengurus dan pemegang saham dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus memenuhi prinsip kehati-hatian atau prudential banking, dan melaksanakan tata kelola yang baik," ujar Direktur Eksekutif Hukum LPS Ary Zulfikar dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat (1/7).

Langkah tersebut merupakan sebuah terobosan hukum yang dilakukan LPS, untuk memperoleh pengembalian (recovery) aset bank gagal, yang diakibatkan kecurangan atau penipuan oleh mantan pengurus dan pemegang saham BPR CDM untuk kepentingan pribadi (fraud).

Sebelumnya, BPR CDM telah dicabut izin usahanya oleh Otoritas Pengawas Bank pada 14 Februari 2008 dan selanjutnya dilakukan proses likuidasi BPR CDM dalam kurun waktu 14 Februari 2008 sampai 12 September 2011.

"Dari proses likuidasi tersebut, masih

terdapat sisa kewajiban yang harus dipenuhi kepada LPS sebagai pemulihan atas biaya penjaminan yang telah dilakukan oleh LPS kepada nasabah hampir sebesar Rp 54 miliar," tambahnya.

LPS pun langsung mengajukan gugatan perdata kepada mantan pengurus dan pemegang saham BPR CDM, berdasarkan putusan gugatan perdata No 493/Pdt/G/2015/PN.Bdg jo No 278/Pdt/2017/PT.BDG jo No 1665 K/PDT/2018, pada pokoknya ketiga debitor tersebut diwajibkan membayar ganti rugi secara tanggung renteng berdasarkan gugatan aquo yang diajukan LPS.

Dalam proses pelaksanaan putusan, terdapat kendala karena pihak-pihak yang dihukum untuk membayar ganti rugi tidak bersikap kooperatif dalam menjalankan putusan. Karenanya LPS mengajukan permohonan PKPU pada 23 Agustus 2021. Dan pada 25 Mei 2022, PN Jakarta Pusat telah memutuskan menolak proposal perdamaian yang diajukan mantan pengurus dan pemegang saham BPR CDM dan memailitkannya.

"Dengan telah dipailitkannya mantan pengurus BPR CDM tersebut, maka berdasarkan hukum, masing-masing mantan pengurus dan pemegang saham yakni Hendra Djaja, Istiarsih dan Moh Icsan Lubis kehilangan seluruh hak perdatanya untuk mengelola aset-asetnya dan harus diserahkan kepada Tim Kurator yang ditunjuk Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat," pungkasnya. (San)-